

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-BUDDY DALAM SURAT – MENYURAT SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO

EFFECTIVENESS OF USING E-BUDDY IN LETTERS - LETTERING TO THE DPRD SECRETARIAT OF SIDOARJO DISTRICT

Muhammad Faradian Dzulfa

Univeritas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. Dr. Ir. Soekarno No. 682 Gunung. Anyar,
Surabaya 60294,
dzulfa41@gmail.com

ABSTRAK: Globalisasi teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan dengan peranannya dalam penciptaan, penyimpanan, transmisi, dan distribusi informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, televisi, dan telepon genggam meningkatkan kebutuhan akan teknologi informasi. Pemerintahan adalah salah satu bidang yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai E-Government menjadi landasan untuk memperkenalkan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Inpres ini menekankan pentingnya kesepahaman, sinkronisasi, dan integrasi langkah di antara instansi pemerintah dalam penerapan kebijakan dan strategi e-Government secara nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena melibatkan isu-isu yang berkaitan dengan manusia dan bergantung pada observasi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi, keyakinan, dan pemikiran individu serta kelompok. Data primer diambil langsung dari pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui pertanyaan tertulis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terdahulu. Subyek penelitian adalah pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan data. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman, dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui catatan lapangan yang mencatat pengamatan, peristiwa, dan pembicaraan selama penelitian.

Kata Kunci: *e-Government, e-Buddy, Sekretariat DPRD*

ABSTRACT: *The globalization of information technology has influenced various aspects of life with its role in the creation, storage, transmission and distribution of information. The use of electronic devices such as computers, televisions and mobile phones increases the need for information technology. Government is one field that is developing along with technological advances. Presidential Instruction Number 3 of 2003 concerning E-Government is the basis for introducing information technology in public services to increase efficiency, effectiveness, transparency and accountability in government governance. This Presidential Instruction emphasizes the importance of understanding, synchronization and integration of steps between government agencies in implementing e-Government policies and strategies nationally. This research uses a qualitative approach because it involves issues related to humans and relies on observation. Qualitative research methods are used to explain events, social activities, attitudes, perceptions, beliefs and thoughts of individuals and groups. Primary data was taken directly from Sidoarjo Regency DPRD Secretariat employees through written questions, while secondary data was obtained from previous literature. The research subjects were employees at the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat. Data collection techniques include observation, interviews, and data recording. Data analysis follows the Miles & Huberman model, with data reduction activities, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the data was obtained through field notes which recorded observations, events and conversations during the research.*

Keywords: *e-Governemnt, e-Buddy, DPRD Secretariat*

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi informasi *globalisasi* di berbagai aspek bidang tak lepas dari peran dalam membuat, menyimpan, menyampaikan, hingga menyebarkan informasi. Penggunaan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan handphone telah meningkatkan akan kebutuhan akan teknologi informasi di kalangan Masyarakat umum. Banyak hal yang dapat mempermudah kerja manusia di kehidupan modern ini. Seperti kemudahan mendapatkan informasi dan bisnis. Teknologi juga berkembang di lingkup pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Salah satu bidang yang mulai berkembang dalam kemajuan teknologi yakni Pemerintahan. Ruang lingkup Pemerintahan menjadi aspek paling penting dalam penggunaan teknologi, dimana pada ruang lingkup tersebut sangatlah memertlukan penggunaan komputer guna menyelesaikan beberapa permasalahan atau kebutuhan yang ada didalam lingkungan tersebut.

Sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E- Government. Implementasi dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan publik untuk terciptanya proses birokrasi yang *Good Governance* perlu beberapa peningkatan yaitu efisiensi, efektifitas, transparansi dan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Melalui instruksi presiden ini maka pada proses pelaksanaannya perlu adanya dorongan kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh kelembagaan pemerintah, oleh karenanya *Inpres* menekan proses jalanya pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government* secara nasional.

Terdapat dua fitur atau kriteria utama yang harus ada dalam system E-Government: Ketersediaan (availability) dan aksesibilitas (accessibility). (Sami, 2012). Pertama operasional layanan e-Government harus tersedia 24 jam, sehari 7 hari (1 minggu) non- stop. Pengguna bebas memilih kapan saja untuk tetap terhubung dengan pemerintah dalam melakukan berbagai mekanisme transaksi dan interaksi. Dengan demikian dapat mempermudah pegawai aparatur sipil negara dalam menggunakan akses layanan yang terhubung dengan pemerintah pusat. Kedua e-Government sangat bergantung pada aksesibilitas layanan yang tersedia di website jika layanan tidak tersedia, maka diasumsikan bahwa e-government belum berhasil atau akan gagal Berdasarkan *Inpres* Nomor 3 Tahun 2003, Upaya e-Government dalam mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi telah banyak dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi yang berfokus pada berkembangnya E-Government pada sistem Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 2 Juli Tahun 2018. Tujuan diadakan peraturan ini mengatur dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Sidoarjo dengantujuan mewujudkan Smart City. Secara ringkas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka Smart City di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan ini mengatur tentang evaluasi struktur tata kelola TIK, pengembangan TIK, pemanfaatan TIK, implementasi TIK khususnya di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

E-buddy merupakan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didalam aplikasi tersebut mencakup tentang bagaimana pengelolaan surat menyurat di lingkungan instansi pemkab sidoarjo hal ini juga sebagai Upaya dalam mewujudkan good governance sehingga akan menjadi terciptanya sebagai daerah yang menjalankan tuntutan salah satu reformasi birokrasi yaitu wujud pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta dapat memberikan pelayanan cepat, efektif, efisien, dan konsisten sebagai perwujudan birokrasi yang akuntabel. Hal ini juga termasuk sebagai tujuan yang harus dapat diterapkan melalui e-government diharapkan Lembaga pemerintah mampu bekerja secara maksimal, dan perlu adanya keseriusan agar dapat tercapainya hal yang baru dalam birokrasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik mengambil judul penelitian artikel yaitu “Efektivitas Penggunaan E-Buddy Dalam Surat – Menyurat Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa aspek poin penting yang terdapat dalam aplikasi E-Buddy sehingga peneliti mampumemahami bagaimana sistem kerja dari aplikasi tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menginvestigasi dalam konteks situasi alamiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan – pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada obyek penelitian guna mendapat informasi. Selanjutnya data sekunder data yang secara tidak langsung guna mendukung data yang sudah ada sehingga lebih lengkap adalah tergolong data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui literature terdahulu seperti, artikel, jurnal atau skripsi. Moleong (2010;132) menggambarkan subjek penelitian sebagai informan, artinya pihak yang memberikan keterangan tentang keadaan dan kondisi ditempat penelitian. Kemudian melakukan wawancara kepada selaku Plt Kabag Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu Ibu Sri Sugiarti dan melakukan diskusi tanya jawab terkait efektivitas penggunaan aplikasi e-buddy untuk menunjang kerja pegawai. Serta melakukan pencatatan data yang terkait dengan kebijakan ini dengan menggabungkan studi literature dan wawancara. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2007:2009) “Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, diamati, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif”. Dalam hal ini peneliti membuat catatan khusus dalam bentuk pembicaraan atau pokok – pokok pengamatan, gambaran dan peristiwa yang dapat dilihat dan didengar selama penelitian, kemudian dijelaskan lebih detail dan mengubah menjadi catatan lengkap Catatan-catatan tersebut berfungsi sebagai data konkrit yang dapat mendukung hipotesis kerja dan menentukan tingkat kepercayaan terhadap keabsahan data yang diperoleh

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. WEBSITE *E-BUDDY* DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN SIDOARJO

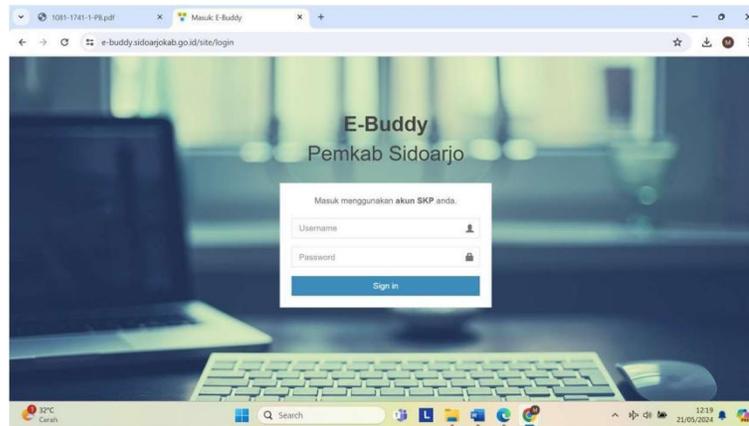
Kabupaten Sidoarjo, merupakan kabupaten yang terletak pada Provinsi Jawa Timur sebelah selatan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo merupakan pusat informasi kegiatan anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Informasi yang diberikan mencakup agenda kegiatan DPRD dan studi bidang politik di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dalam juga terdapat pengelolaan surat menyurat yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD di bagian Tata Usaha adalah upaya melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pengembangan *E-Government*.

Selain itu dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peraturan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan serta dalam surat menyurat sudah menjalankan UUD 28F serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 dan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018, yang dimana kedua kebijakan tersebut mengarah ke

pengembangan *e-Government* Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah melaksanakannya.

Kebijakan yang dihasilkan dalam pengembangan *e-Government* di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo terutam di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yaitu *e-buddy*. E-buddy merupakan salah satu aplikasi elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kegunaan aplikasi e-buddy untuk mengelola naskah dinas secara elektronik. Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah untuk memasukkan, mengelola dan mendistribusikan surat-surat resmi dari pemerintah daerah. Ebuddy memungkinkan karyawan dan unit kerja mengakses dan mengelola dokumen secara online, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengelolaan dokumen.

Gambar 3.1



Sumber: Aplikasi e-buddy

Untuk dapat mengakses aplikasi e-buddy pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu harus login melalui <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id/site/login> menggunakan Username dan Pasword yang biasa digunakan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam Pasal 4A terdapat 3 poin nilai yang tertuang pertama Penyelenggaraan naskah dinas dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik. Kedua penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi surat elektronik dengan alamat URL <https://e-buddy.sidoarjokab.go.id/site/login> dan yang ketiga penyelenggaraan naskah dinas secara elektronik selain menggunakan aplikasi naskah dinas sebagaimana dimaksudkan ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

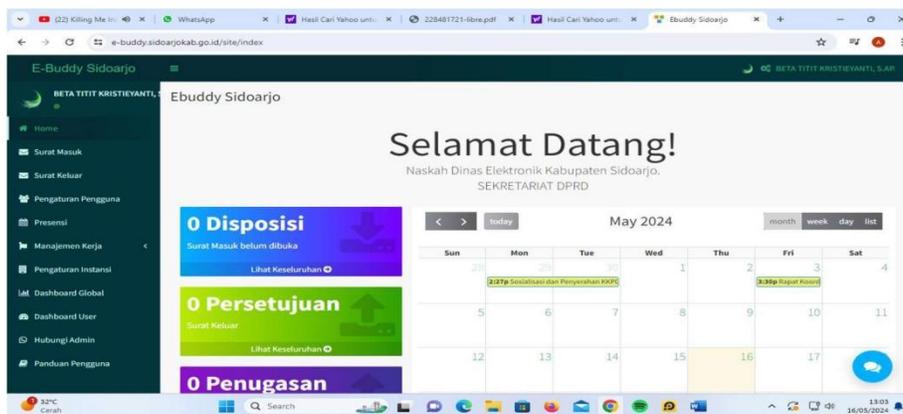
Didalam naskah dinas elektronik atau biasa disebut e-buddy digunakan oleh ASN di Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung kegiatan sehari-hari mereka. Aplikasi ini dikembangkan guna mempermudah komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu fungsi e-buddy di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memiliki kemampuan khusus dalam pengelolaan arsip. Aplikasi ini juga digunakan untuk mengirim dan menerima surat dari OPD terkait dan pengelolaan arsip berupa surat masuk dan keluar, serta penerimaan presensi ASN terkait.

2. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-BUDDY DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan website e-buddy di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik dan efektif. E-Buddy Kabupaten Sidoarjo juga menjadi bagian penting dalam transformasi digital di Kabupaten Sidoarjo, menggantikan surat konvensional dengan bentuk digital yang lebih efektif dan efisien. Keunggulan ini juga menjadi nilai tambah dalam penggunaannya, karena pengguna atau pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo khususnya Tata Usaha tidak perlu bekerja dua kali dalam proses pembuatan surat karena semua mencakupururusan instansi sudah ada didalamnya.

Aplikasi E-Buddy juga telah dilengkapi fitur-fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file surat dimanapun dan kapanpun dengan mudah, serta jaminan keamanan terhadap surat-surat perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Dalam aplikasi e-buddy juga terdapat menu surat masuk, surat keluar, pengaturan pengguna, presensi, manajemen kerja, pengaturan instansi, dan beberapa panduan serta pengaduan apabila aplikasi sedang dalam masalah. Tampilan awal ketika login aplikasi e-buddy sebagai berikut:

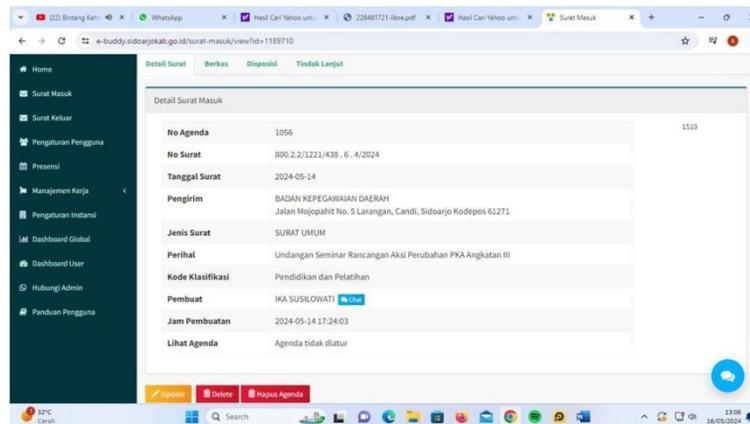
Gambar 3.2



Sumber: Aplikasi e-buddy

Kemudahan akses dalam penggunaan website e-buddy ini sangat menunjang kinerja pegawai ASN khususnya di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam kepengurusan surat masuk dan keluar. Dalam website tersebut juga terhubung seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo sehingga surat yang disampaikan bisa masuk secara mudah dan tidak harus menunggu lama sehingga kemudahan ini juga salah satu wujud keberhasilan e-Government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Berikut gambar surat masuk di website e-buddy Sekretariat Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 3.3



Sumber: Aplikasi e-buddy

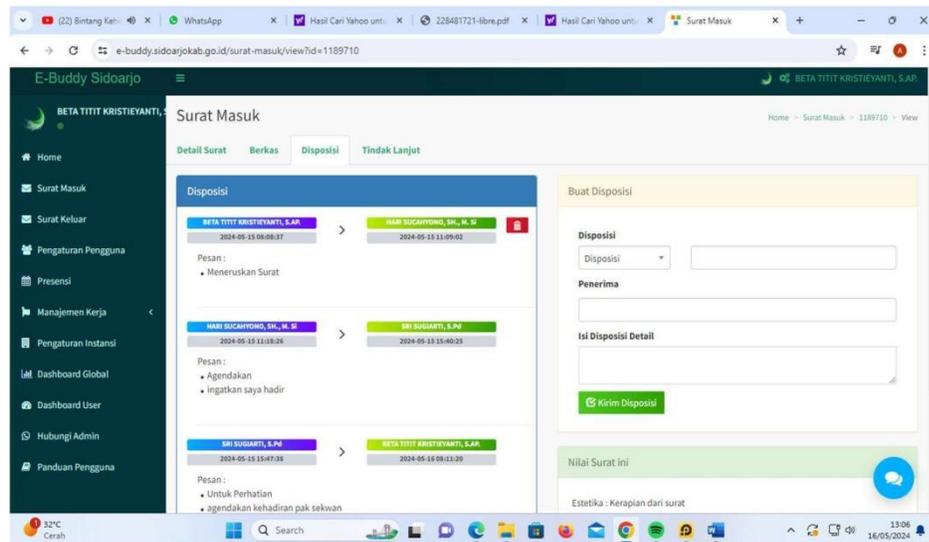
Gambar diatas merupakan salah satu surat masuk dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengirim surat melalui website e-buddy dalam lampiran tersebut terdapat nomor surat, tanggal surat, jenis surat dan yang paling penting pesan yang disampaikan. Sehingga berita ini kemudian dapat dilihat oleh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui akun e-buddy masing – masing pegawai. Hal ini juga sejalan dengan motto dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo “Meningkatkan kerja secara profesional memfasilitasi Anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.

3. DISPOSISI

Hasil wawancara dengan Ibu Sri Sugiarti, selaku Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi e-buddy sangat membantu kinerja pegawai sehingga dari kebiasaan mengirim surat menyurat yang menggunakan manual sekarang hanya dengan mengakses aplikasi didalamnya ASN dapat terhubung seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Sistem aplikasi e-buddy dapat diakses oleh semua pengguna dengan cakupan sistem komunikasi eksternal, komunikasi internal, disposisi dan pembuatan surat dilengkapi alur kerja untuk surat masuk, disposisi, dan surat keluar.

Namun ada pengecualian dalam aplikasi e-buddy ini yaitu surat pengaduan hal ini akan langsung disampaikan kepada Ketua DPRD kemudian dibukukan dan diserahkan ke Tata Usaha untuk dimasukkan ke e-buddy. Apabila surat tersebut dikirimkan kepada sekretariat maka selaku pegawai Tata Usaha akan mendisposisikan surat tersebut kepada Sekretaris Dewan, kemudian sekwan akan disposisi surat kepada yang dituju. Contohnya surat tersebut akan dikirimkan ke bagian masing-masing. Dari hasil pemaparan diatas merupakan hasil wawancara lebih lanjut dengan penjelasan dari Ibu Sri Sugiarti selaku Plt. Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Gambar 3.4



Sumber: Aplikasi e-buddy

Berdasarkan gambar diatas merupakan suatu contoh bagaimana cara kerja disposisi surat yang dilakukan pegawai Tata Usaha yang diteruskan kepada Sekretaris Dewan untuk dilihat apa kegiatan yang akan dilakukan kemudian membutuhkan persetujuan untuk tanda tangan digital.

D. KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat kita pahami bahwa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government mulai diterapkan diberbagai wilayah baik pusat maupun daerah. Hal ini juga mendorong Kabupaten Sidoarjo dalam menciptakan kota berbasis *Smart City* sesuai dengan Peraturan Bupati No 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka Smart City di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan ini mengatur tentang evaluasi struktur tata kelola TIK, pengembangan TIK, pemanfaatan TIK, implementasi TIK khususnya di Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

Sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati tersebut khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mulai menjalankan kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan *e-Government* dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Munculnya aplikasi *e-buddy* membuat kinerja pegawai ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo semakin mudah. Hal ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh Plt Kabag Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo bahwa adanya *e-buddy* berguna dalam menunjang kinerja pegawainya.

Dalam aplikasi *e-buddy* juga memiliki banyak fitur khususnya dalam penerimaan surat menyurat yang dapat menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu *e-buddy* juga dapat menghubungkan antara masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo. Karena pengaduan yang dilayangkanakan di bukukan melalui *e-buddy* dan kemudian akan disampaikan kepada komisi terkait mengenai permasalahan apa yang dihadapi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M., Hamsah, H., & Nurkadarwati, N. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Elektronik Surat dalam Mewujudkan Electronic Government di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 108-117.
- Ahmad, J. (2018). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129-138.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Karimun. *Jurnal Archipelago*, 1(1), 63-76.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403-422.
- Ridha, M. (2023). Efektivitas Dan Efisiensi Sistem Pengelolaan Administrasi Surat Pada Kementerian Kesehatan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 5(2), 5.
- Rusfiana, Y., & Supriyatna, C. (2021). Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya.
- Setianingrum, K., Sumaryadi, H. N., & Wargadinata, E. PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.
- Sulaiman, M., Maysarah, M., & Wulandari, R. P. (2022). Penerapan E-Government dalam Upaya
- Sumardi, S., Nawir, A., & Mukhlis, S. (2021). Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia. *Journal of Government Insight*, 1(2), 84-91.
- Suryansyah, V. A., Murti, I., & Rahmadanik, D. (2022, August). Inovasi Pelayan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Penggunaan e-Buddy. In *Seminar Nasional Hasil Skripsi* (Vol. 1, No. 01, pp. 176-180).
- Yuwono, T., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2020). Semua berawal dari it: terobosan banyuwangi dalam menata ulang tatakelola pemerintahan. *POLITIKA*, 11(2), 149.